

**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MERAMPAS
BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
UNTUK NEGARA**

TESIS

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Pada
Program Pascasarjana Universitas Andalas*

RIVANLI AZIS
NIM.1820119003



Pembimbing :

- 1. Dr.Yoserwan, SH, MH, LLM**
- 2. Prof.Dr.Kurniawarman, SH, M.Hum**

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2020

Abstrak
**KEDUDUKAN KEJAKSAAN DALAM PERLAWANAN PIHAK KETIGA
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG MERAMPAS
BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
UNTUK NEGARA**

**(Rivanli Azis, 1820119003, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 175 hlm, Tahun 2020)**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri menafsirkan upaya hukum keberatan pihak ketiga beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika yang dimuat di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sama dengan *derden verzet* di dalam hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 378 Rv. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya penjelasan tentang keberatan tersebut di dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Permasalahan yang timbul adalah : (1) bagaimana kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika, (2) bagaimana kriteria pihak ketiga yang beritikad baik di dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika, dan (3) bagaimana prosedur perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika. Untuk memperoleh data penelitian yang akurat, digunakan metode penelitian *juridis normatif* yang berasal dari data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis dengan menekankan aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan dihubungkan dengan bahan hukum yang ada. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Kedudukan Kejaksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika adalah mewakili negara sebagai Turut Tergugat/Terlawan dengan dasar menguasai objek barang sengketa yang dirampas oleh Pengadilan Negeri dalam pidana Narkotika, (2) kriteria pihak ketiga yang beritikad baik dalam perkara perlawanan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika adalah memperoleh hak kepemilikan yang dibuktikan dengan surat-surat perjanjian, tidak mengetahui dan tidak mengizinkan alat/barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana atau alat bantu melakukan tindak pidana narkotika, dan (3) Prosedur perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap putusan Pengadilan Negeri yang merampas barang bukti untuk negara dalam tindak pidana narkotika adalah mengajukan gugatan/perlawanan pihak ketiga kepada Kejaksaan dengan berpedoman kepada *derden verzet* sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan Pengadilan tingkat pertama.

Kata Kunci : Kedudukan Kejaksaan, Perlawanan Pihak Ketiga, dan Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

POSITION OF PROSECUTOR IN THIRD PARTY OBJECTION THE DECISION OF THE COURT OF COUNTRIES THAT CONFISCATING EVIDENCE GOODS OF THE NARCOTIC CRIMINAL ACT FOR COUNTRIES

(Rivanli Azis, 1820119003, Master of Law, Postgraduate Faculty of Law,
Andalas University, 175 pages, 2020)

The District Court Panel of Judges interpreted the remedies of third party objections in good faith to the District Court's decision that confiscating evidence goods for the state in narcotics crime contained in Article 101 paragraph (2) of Law Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics is the same as *derden verzet* in the civil procedural law as regulated in Article 195 paragraph (6) of HIR or Article 378 Rv. This is motivated by the absence of an explanation of the objection in Article 101 paragraph (2) of Law Number 35 Year 2009 Concerning Narcotics. Problems that arise are : (1) how the Prosecutor's position is in the case of a third party objections to the decision of the District Court that confiscating evidence goods for the state in narcotics crime, (2) how the criteria of third parties who have good faith in the case of third party objection to the decision of the Court the country that confiscating evidence goods for the state in narcotics crime, and (3) how is the procedure of the third party's objection to the decision of the District Court that confiscating evidence good for the state in narcotics crime. To obtain accurate research data, *normative juridical* research methods are used which are derived from secondary data collected by the author by emphasizing legal aspects related to the problem and related to existing legal material. From the results of the study it was concluded that: (1) The Prosecutor's position in the matter of a third party in favor of the State Court's decision to confiscating evidence goods for the country in narcotics crime was to represent the State as Defendant / Defendant on the basis of possession of the object of the dispute that was confiscating by the State Court in Narcotics, (2) the criteria of a third party having a good intention in a case of objection to a District Court ruling that confiscating evidence goods for the state in a narcotics crime is obtaining ownership rights as evidenced by agreement letters, not knowing and not allowing such evidence goods to be used as a means or tool help commit narcotics crime, and (3) The third party objection procedure in good faith against the decision of the District Court that confiscating evidence goods for the state in narcotics crime is filed a third party objection to the Prosecutor's Office based on *derden verzet* as stipulated in Article 195 paragraph (6) HIR within 14 (fourteen) days after the announcement of the first level Court decision.

Keywords : Narcotics Crime, Prosecutor's Position, Third Party Objection.